

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor yang mendasari terjadinya aktivitas ekspor *e-waste* Inggris ke Nigeria antara lain: keuntungan di bidang ekonomi bagi masing-masing negara; lemahnya regulasi Nigeria sebagai negara penerima *e-waste*; dan tingginya tingkat pengangguran di Nigeria. Faktor-faktor tersebut menjadi alasan yang melatarbelakangi aktivitas ekspor *e-waste* tersebut. Inggris sebagai negara *core* mendapat keuntungan dengan mengalirkan *e-waste* ke Nigeria dengan keuntungan ekonomi yang dihasilkan.

Sesuai dengan konsep *supply and demand*, Inggris selaku negara pengekspor berperan sebagai *supply* terhadap komoditi berupa limbah elektronik (*e-waste*) sementara Nigeria sebagai negara penerima merupakan tempat dimana *demand* terhadap limbah elektronik berasal. Berkaitan dengan konsep *cost and benefit*, aliran *e-waste* dan perdagangannya memberikan keuntungan (*benefit*) yang diperoleh dari proses penjualan dan pendaur ulangan material berharga yang terkandung di dalamnya. *Benefit* utama yang dirasakan Inggris yaitu ketatnya peraturan lingkungan di Inggris membuat aktivitas ekspor *e-waste* ke negara lain lebih dipilih dibanding dengan mendaur ulangnya melalui perusahaan-perusahaan kecil untuk menghindari deteksi aliran *e-waste* mereka. Keuntungan ekonomi diperoleh dengan penciptaan *e-waste* sebagai komoditas, penghindaran biaya

recycling dan *unequal exchange* atas transfer polusi sehingga Inggris tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pemberdayaan lingkungan. Lemahnya kapasitas Nigeria dalam menyediakan *political goods* bagi penduduknya semakin memudahkan Inggris untuk tetap mengalirkan *e-waste* tersebut, yang pada akhirnya memunculkan keuntungan ekonomi dibalik “transfer polusi”.

Sementara *benefit* yang dirasakan oleh Nigeria berasal dari proses penjualan dan daur ulang material berharga yang terkandung di dalamnya limbah elektronik hasil impor dari Inggris. Mata pencaharian banyak masyarakat Nigeria bergantung pada aktivitas aliran limbah elektronik yang menuju ke Nigeria. Karena adanya manfaat sosial-ekonomi dari aktivitas dalam peralatan elektronik bekas, masyarakat Nigeria melihat limbah elektronik sebagai sumber daya.

Selain *benefit*, terdapat juga *cost* yang harus dibayar oleh Nigeria akibat adanya aktivitas ekspor *e-waste* ini. Pengumpulan dan daur ulang limbah elektronik dikaitkan dengan adanya resiko kesehatan yang harus dibayar oleh para pekerja yang terlibat, terutama dari kondisi kerja yang buruk sehingga menyebabkan luka dan infeksi. Selain resiko kesehatan, *cost* yang dirasakan Nigeria juga terdapat di kondisi lingkungan yang terpapar terus-menerus oleh limbah elektronik. Pengolahan limbah elektronik yang tidak melalui prosedur ramah lingkungan dapat menyebabkan polusi dari sampah limbah yang tidak digunakan kembali hingga kerusakan tanah akibat timbunan sampah limbah yang mengandung polutan kimia berbahaya.

Ketidakadilan hadir dalam ekspor limbah elektronik dari Inggris ke Nigeria yang mengakibatkan adanya penjajahan lingkungan yang dilakukan oleh Inggris terhadap Nigeria. Berdasarkan teori imperialisme ekologi kontrol imperialis, dalam hal ini Inggris atas Nigeria terlihat dari antara lain: aktivitas ekspor limbah; kondisi lingkungan yang berbeda menyebabkan penerimaan resiko terhadap ancaman limbah yang juga berbeda sehingga menciptakan imperialisme lingkungan; beban lingkungan yang diterima tidak proporsional dan seimbang sehingga menyebabkan eksploitasi lingkungan; penjajahan lingkungan melalui pengiriman limbah dapat menciptakan kerusakan lingkungan, terdapat *ecological debt* yang harus dibayarkan oleh negara maju ke negara berkembang, pengiriman limbah dapat menyebabkan adanya kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang.

Selain itu, keadilan serta keberlangsungan lingkungan juga didapatkan negara *core* karena ketidakadilan dan resiko lingkungan telah ikut juga dialirkan bersama *e-waste* ke Nigeria. Disinilah *Race to the bottom* dan *pollution haven* terjadi, aliran *e-waste* tersebut merupakan hasil pencarian Inggris untuk menemukan cara yang lebih murah dalam menghindari ketatnya standar lingkungan terkait manajemen *e-waste* di Inggris dan Uni Eropa.

Sementara teori pendukung lainnya juga sesuai dan dapat membantu peneliti untuk menjawab rumusan masalah. Ketidakadilan hadir dikarenakan oleh perbedaan signifikan dalam kualitas lingkungan antara Inggris dan Nigeria, ketimpangan ekonomi, perbedaan kondisi sosial dan budaya dan implementasi

regulasi dan kebijakan yang kurang memadai menyebabkan penajahan lingkungan.

5.2 Saran

Nigeria sebaiknya mampu menyusun kebijakan pengelolaan limbah elektronik; memastikan sistem yang efektif untuk memantau pengiriman, pelabelan yang sesuai, dan sertifikasi fungsionalitas peralatan bekas. Kampanye harus dilakukan untuk mendidik masyarakat tentang bahaya yang terkait dengan limbah elektronik, memberlakukan pembatasan impor peralatan bekas. Pembatasan harus diterapkan pada impor barang elektronik bekas, PC, dan barang lainnya, sehingga elektronik bekas yang diimpor untuk digunakan kembali harus diproduksi kurang dari 5 tahun sebelumnya. Karena belum ada pengaturan struktur daur ulang limbah elektronik formal, perlu dilakukan pengaturan melalui sistem pengumpulan limbah sektor informal terutama melalui sistem di mana teknisi dapat menggunakan kembali komponen dari limbah, memperbaiki dan memulihkan limbah elektronik.

Kegagalan larangan yang ada pada pergerakan lintas batas limbah elektronik ke Nigeria membuat pembuat kebijakan perlu menemukan cara baru dan inovatif untuk mengatasi dampak lingkungan dan kesehatan manusia yang terkait dengan impor. Diakui posisi Nigeria mencerminkan tanggapan peraturan populer yang pada dasarnya berfokus pada pelarangan pengiriman limbah elektronik lintas batas. Namun, untuk faktor-faktor yang saling terkait di mana sebagian besar bersifat sosial-ekonomi, tanggapan kebijakan ini kurang

dipromosikan sehingga sangat tidak efektif dalam menghilangkan perpindahan lintas batas limbah elektronik ke Nigeria.

Oleh karena itu, sebaiknya diadakan perubahan kebijakan dari pelarangan impor limbah elektronik ke peraturan dan pengelolaan impor yang berkelanjutan di Nigeria, seperti yang terlihat dari pengalaman di Ghana. Dalam hal ini, NESREA didesak untuk mengubah Peraturan Sektor EEE dengan menghapus ketentuan yang mengkriminalisasi impor limbah elektronik ke Nigeria. Ini tidak hanya akan memungkinkan Nigeria untuk memanfaatkan manfaat sosial-ekonomi yang timbul dari impor tersebut, tetapi juga akan memungkinkan pembentukan fasilitas daur ulang formal yang pada akhirnya akan mengarah pada pengelolaan lingkungan limbah elektronik yang lebih baik di dalam negeri.

Pergeseran kebijakan seperti itu tidak memerlukan banyak perubahan pada kerangka peraturan yang ada tentang limbah elektronik, karena Peraturan Sektor EEE telah mengatur pendaftaran semua importir EEE. Seperti pendirian dan pengelolaan fasilitas daur ulang yang berkelanjutan di Nigeria, serta mewajibkan pembayaran biaya administrasi untuk semua impor EEE baru dan bekas. Yang terakhir harus diperluas untuk mencakup impor limbah elektronik karena akan membantu pengelolaan limbah yang ramah lingkungan di Nigeria. Usulan perpanjangan biaya administrasi untuk impor limbah elektronik berbeda dengan posisi di bawah UU Limbah Berbahaya di Ghana. Namun, ini akan menghindari skenario di mana importir EEE bekas akan mulai menyatakan barang mereka sebagai limbah elektronik secara salah untuk menghindari pembayaran biaya.

Para teknisi harus dijadikan pengumpul utama sebelum mengirimkan limbah tersebut ke pusat yang ditunjuk untuk pengumpulan formal akhir. Pra-pemrosesan ini dapat dimulai dari unit informal ini yang akan menawarkan banyak peluang kerja. Kebutuhan untuk menerapkan kebijakan ekonomi untuk memajukan daur ulang barang-barang listrik dan elektronik bekas. Penekanan harus pada penggunaan bahan yang kurang beracun untuk produksi elektronik. Itu harus sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diperoleh kembali dan bahan yang dapat didaur ulang yang dapat diambil kembali untuk perbaikan, pembuatan ulang, pembongkaran dan penggunaan kembali. Nigeria harus mencontoh negara-negara Eropa yang melarang impor produksi bahan CRT dan produk sejenis yang mengandung zat berbahaya. Pemisahan produk berdasarkan pabrikan, jenis, dan produk akan menjadi keuntungan nyata untuk pemrosesan ulang di masa mendatang.

